

KETAHANAN KELUARGA DAN BUDAYA KOLEKTIF BANGSA INDONESIA

13

Lukman Nul Hakim

Abstrak

Bangsa Indonesia telah merayakan Hari Keluarga Nasional selama 25 tahun, namun angka tersebut belum mencerminkan ketahanan keluarga sebagaimana mestinya. Salah satu faktor penyebab longgarnya ketahanan keluarga, yaitu melemahnya rasa peduli sesama anggota keluarga yang dipengaruhi oleh pesatnya penggunaan teknologi. Berbagai upaya pemerintah belum mampu mengejar ketertinggalan cepatnya perkembangan teknologi dan mengantisipasi berbagai dampaknya. Budaya kolektif sebagai kelebihan bangsa Indonesia dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk memahami permasalahan ini. Diperlukan upaya komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan. DPR dapat mengambil peran dengan mengajukan RUU Ketahanan Keluarga yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019, agar dapat dibahas dan disahkan pada akhir periode 2014-2019.

Pendahuluan

Setiap tanggal 29 Juni bangsa Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas). Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Presiden R.I No. 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional. Dalam rangka memperingati Harganas pada tahun 2018 ini, pemerintah melalui BKKBN melakukan serangkaian kegiatan di Manado Sulawesi Utara. Kegiatan dimulai sejak tanggal 29 Juni dan diakhiri pada tanggal 7 Juli, dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.

Berdasarkan sejarahnya, peringatan Hari Keluarga Nasional diinisiasi oleh Presiden Soeharto 25 tahun yang lalu pada tanggal 29 Juni 1993. Penetapan tanggal tersebut didasari waktu kembalinya para tentara Republik Indonesia kepada keluarga masing-masing, setelah perang gerilya melawan Agresi Belanda di Kota Yogyakarta (ntb.bkkbn.go.id, 29/06/2016). Tepat 21 tahun kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Harganas melalui Surat Keputusan Presiden (Kepres) R.I No. 39 Tahun 2014.



Kepres tersebut dihadirkan untuk mendorong terciptanya keluarga Indonesia yang berkualitas. Seperti dituliskan pada bagian Pertimbangan Kepres, bahwa penetapan peringatan Harganas merupakan suatu upaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat terhadap pentingnya keluarga kecil, bahagia, sejahtera dan menjadikan keluarga sebagai pilar pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

Namun demikian, faktanya dalam rentang waktu 25 tahun sejak dicanangkan, berbagai upaya peningkatan kualitas keluarga masih belum dapat mengejar ketertinggalan dari eksekutif yang disebabkan perubahan zaman. Keluarga Indonesia menghadapi tantangan yang jumlahnya justru semakin banyak, dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan banyaknya keluarga di Indonesia yang belum siap menghadapi tantangan tersebut. Tulisan ini akan membahas lebih jauh permasalahan tersebut, dengan menjawab pertanyaan berikut: apa yang perlu dilakukan negara untuk meningkatkan ketahanan keluarga?

Ancaman Teknologi terhadap Ketahanan Keluarga

Saat ini penggunaan gawai (*gadget*) yang sangat masif telah menjadi permasalahan di berbagai negara. Penggunaan gawai seperti tidak mengenal usia, tempat, dan waktu. Berbagai penelitian menunjukkan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan oleh anak-anak, remaja, maupun dewasa dengan gawai. Penggunaan teknologi di satu sisi memang memberikan manfaat yang positif, yaitu mudahnya akses terhadap informasi

dan pengetahuan. Di sisi lain, pemanfaatan yang tidak tepat justru memberikan efek negatif.

Hasil penelitian organisasi *nonprofit Common Sense Media* (edition.cnn.com, 19/10/2017) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, rata-rata anak berusia di bawah 8 tahun menggunakan gawai selama 2 jam 19 menit per hari. Sementara temuan *Nielsen Company Audience Report* menunjukkan bahwa rata-rata orang dewasa di Amerika Serikat menghabiskan 10 jam 39 menit untuk melihat ke layar (edition.cnn.com, 30/06/2016). Di Inggris, penelitian oleh BBC menunjukkan rata-rata anak usia 11-12 tahun menggunakan gawai selama 4 jam per hari. Sementara itu, temuan penelitian dari Singapura lebih mengkhawatirkan, penggunaan gawai mencapai 12 jam 42 menit per hari (straitstimes.com, 03/04/2017).

Berdasarkan tingkat ekonomi keluarga, terdapat perbedaan durasi penggunaan gawai pada anak-anak. Anak-anak dari ekonomi bawah menggunakan gawai selama 3 jam 29 menit per hari, sedangkan dari ekonomi atas yaitu 1 jam 50 menit. Sementara berdasarkan kepemilikan gawai perbandingannya sangat tipis, tingkat ekonomi bawah sebesar 96%, sedangkan ekonomi atas 99% (edition.cnn.com, 19/10/2017).

Berbagai penelitian tersebut dilakukan di luar negeri. Sejauh ini penulis belum menemukan survei berskala besar dengan responden masyarakat Indonesia. Akan tetapi, fenomena di luar negeri tersebut diyakini juga terjadi di Indonesia karena telah banyak ditemukan kasus yang diawali dari teknologi. Contohnya: di Bondowoso, dua orang remaja usia 17 dan 15 tahun didiagnosa mengalami gangguan

kejiwaan karena kecanduan bermain *game*. Perilaku gangguan yang ditunjukkan yaitu dengan mengamuk dan membanting-banting benda di rumahnya, murung, dan menyakiti diri sendiri ketika tidak diberikan akses untuk bermain *game* (liputan6.com, 18/01/2018).

Kasus tersebut di atas muncul karena lemahnya ketahanan keluarga. Ikatan di antara anggota keluarga menjadi longgar dan keluarga tidak mampu melakukan peran kontrol, sehingga menghasilkan anak-anak yang lepas kontrol. Penggunaan gawai yang tidak terkontrol menurunkan kualitas hidup. Survei *Ernst and Young* terhadap 1.000 orang berusia 18-69 di Singapura menunjukkan, sebanyak 30% responden mengakui mengalami gangguan tidur karena penggunaan gawai; dan 38% menghabiskan waktu lebih banyak dengan gawainya dibandingkan berbicara dengan pasangan ataupun temannya (straitstimes.com, 03/04/2017). Penggunaan gawai menurunkan frekuensi komunikasi langsung para anggota keluarga, karena meskipun berada dalam satu ruangan semua anggota keluarga sibuk dengan gawainya masing-masing.

Apabila kita meyakini bahwa keluarga adalah pilar bangsa, maka semakin banyak keluarga yang lemah ketahanan keluarganya, yang akan mengakibatkan pilar bangsa menjadi rapuh. Kondisi ini akan semakin menjauhkan kita dari cita-cita terciptanya keluarga sebagai pilar bangsa yang kokoh demi kesejahteraan bangsa.

Peran Budaya terhadap Ketahanan Keluarga

Padanan kata dalam bahasa Inggris untuk kata 'ketahanan

keluarga' adalah *family resilience*. *Resilience* adalah kemampuan menciptakan keseimbangan atau stabilitas ketika menghadapi kesulitan yang besar (MacPhee, Lunkenheimer, dan Riggs, 2015: hal. 153). Ketahanan keluarga akan terlihat ketika menghadapi masa transisi yang sulit, karena melibatkan usaha menjaga stabilitas, usaha untuk beradaptasi dengan kondisi, berusaha mengelola emosi negatif, dan kemampuan pengambilan keputusan yang efektif (MacPhee, dkk, 2015: hal. 153).

Mengkaji tentang ketahanan keluarga, maka teori budaya bangsa dari Hofstede sesuai untuk menjadi referensi kajian. Kita dapat melihat ketahanan keluarga dari aspek budaya. Pemahaman akan budaya sendiri dan dikontraskan dengan budaya lain, akan memudahkan kita untuk mencari bentuk terbaik untuk menciptakan ketahanan keluarga bagi masyarakat Indonesia. Kajian paling populer tentang perbedaan budaya antar-negara adalah penelitian yang dilakukan oleh Hofstede.

Terdapat enam dimensi budaya yang membedakan antara satu masyarakat suatu negara dengan masyarakat dari negara lainnya, yaitu *power distance*, *uncertainty avoidance*, *individualism vs collectivism*, *masculinity vs femininity*, *long term vs short term orientation*, dan *indulgence vs restraint* (hofstede-insights.com, 04/07/2018). Di antara keenam dimensi tersebut, dimensi *individual versus collectivism* relevan dengan bahasan ketahanan keluarga. Dimensi ini terkait posisi individu dalam masyarakat dan Indonesia mewakili negara dengan masyarakat kolektif. Pada budaya kolektif, tiap anggota kelompok

diharapkan saling menjaga anggota kelompok lainnya, misalnya anggota keluarga.

Budaya kolektif merupakan kekuatan sekaligus kelemahan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki kekuatan pada budaya kolektif, ketika di dalam keluarga terjadi situasi berkurangnya rasa kepedulian dan pengabaian sesama anggota keluarga, maka hal ini akan melemahkan ketahanan keluarga. Misalnya, seorang anggota keluarga akan merasa diacuhkan dan tidak dihargai ketika tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dampaknya, situasi ini akan menciptakan ketidakstabilan dan longgarnya ikatan di antara anggota keluarga tersebut.

Namun di sisi, lain masyarakat pada budaya kolektif sesungguhnya dapat lebih cepat beradaptasi dan pulih jika memiliki dukungan sosial. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana alam di Indonesia maka proses pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan memunculkan kekaguman dunia, karena budaya saling bantu di Indonesia yang sangat kuat. Salah satu ciri masyarakat berbudaya kolektif, yaitu: prinsip “jika mengalami kesusahan maka dirasakan bersama dan jika mendapatkan kesenangan juga dirasakan bersama”.

Merujuk pada teori Hofstede, bangsa Indonesia harus menjaga kekuatan budaya kolektif bangsa ini. Kekuatan yang telah tertanam (*embedded*) pada budaya kita. Oleh karena itu, negara perlu mencegah agar tidak terjadi pelemahan budaya kolektif bangsa. Diperlukan upaya antisipasi agar kemajuan teknologi tidak melunturkan budaya positif yang

kita miliki. Negara harus melakukan langkah-langkah tidak hanya untuk mempertahankan (*preserve*), tetapi juga memperkuat (*strengthen*) modal utama bangsa ini. Namun demikian, upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan intens. Komprehensif karena memang langkah-langkah tersebut harus melibatkan banyak *stakeholders*, dan intens karena saat ini kita sedang berkejaran dengan waktu.

Diperlukan upaya konkret dalam mempercepat pembangunan ketahanan keluarga. Pembentukan ketahanan keluarga memerlukan upaya yang terstruktur, dimulai dari unit masyarakat terkecil sampai dengan yang paling besar. Pada unit terkecil, keluarga perlu mendapatkan pengetahuan yang baik bagaimana membangun keluarga yang berkualitas. Pengetahuan tersebut antara lain mengenai: upaya menjaga keharmonisan pasangan suami isteri, cara mendidik anak, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, dan merencanakan masa depan anggota keluarga.

Pada unit masyarakat skala menengah seperti: sekolah, lingkungan kerja, dan media massa, perlu dilakukan upaya untuk mendukung pembentukan keluarga yang berkualitas. Pada unit masyarakat terbesar, yaitu negara; diperlukan suatu kebijakan yang mendorong terciptanya ketahanan keluarga (*family resilience*) melalui undang-undang. Harapannya, undang-undang tersebut akan mendorong para *stakeholders* terkait untuk melakukan upaya komprehensif dalam membangun keluarga Indonesia yang berkualitas dan tangguh menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga

Telah ada kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk memasukkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Namun demikian, pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 5 Desember 2017, RUU Ketahanan Keluarga tidak masuk dalam daftar RUU prioritas Prolegnas Tahun 2018. Hal ini menyebabkan langkah pembentukan RUU ini menjadi jalan ditempat.

Tim ahli Komite III DPD telah memberikan usulan substansi untuk RUU Ketahanan Keluarga (pontianak.tribunnews.com, 18/07/2017), antara lain: bahwa tujuan pembangunan ketahanan keluarga adalah agar keluarga Indonesia sejahtera dan berkualitas serta menjadi unit sosial terkecil pembangun manusia berkualitas, pembangun masyarakat madani, dan menjadi fondasi ketahanan dan peradaban bangsa. Sementara itu, muatan materi RUU Ketahanan Keluarga meliputi tujuan, azas, prinsip pembangunan ketahanan keluarga, lingkup pembangunan ketahanan keluarga, tanggung jawab dan penyelenggaraan oleh pemerintah, serta tanggung jawab dan partisipasi penyelenggaraan oleh nonpemerintah.

Penutup

DPR dapat memainkan peran yang penting dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu melalui RUU Ketahanan Keluarga. RUU ini diharapkan dapat mendorong agar adat, tradisi, dan *local wisdom* yang merupakan kekuatan bangsa Indonesia yaitu *guyub*, gotong-royong, atau

kekompakan dapat terus terjaga. RUU Ketahanan Keluarga juga harus menyentuh beberapa aspek teknis seperti: sisipan pendidikan tentang membentuk ketahanan keluarga pada beberapa jenjang pendidikan; mewajibkan pendidikan kursus pranikah sebagai prasyarat pernikahan; pembatasan akses situs dan aplikasi yang berpotensi merusak moral bangsa; memberlakukan disiplin digital di tempat kerja, sekolah, tempat peribadatan; memberikan kelonggaran yang bertanggung jawab bagi pekerja agar kedua orang tua dapat berperan optimal bagi tumbuh kembang anak; dan memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggaran.

Referensi

- "*American Devote More Than 10 Hours a Day to Screen Time, and Growing*", <https://edition.cnn.com/2016/06/30/health/americans-screen-time-nielsen/index.html>, diakses 4 Juli 2018.
- "*Country Comparison Indonesia vs USA*", diolah dari <https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/indonesia,the-usa>, di akses 4 Juli 2018.
- "Hari Keluarga Nasional", <http://ntb.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=684&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897>, diakses 4 Juli 2018.
- "Kecanduan Smartphone, Begini Kondisi Dua Remaja di RS Jiwa Bondowoso", <https://www.liputan6.com/news/read/3230544/kecanduan-smartphone-begini-kondisi-2-remaja-di-rs-jiwa-bondowoso>, diakses 4 Juli 2018.
- "*Kids Under 9 Spend More Than 2 Hours a Day on Screen: Report Shows*", <https://edition.cnn.com>.

com/2017/10/19/health/children-smartphone-tablet-use-report/index.html, diakses 4 Juli 2018.

"Lima Pelaku Pelempar Batu ke Jalan Tol Jakarta Merak Ditangkap Polisi", <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/07/01/lima-pelaku-pelempar-batu-ke-jalan-tol-jakarta-merak-ditangkap-polisi>, diakses 4 Juli 2018.

"People in Singapore Spend Over 12 Hours on Gadgets Daily: Survey", <https://www.straitstimes.com/singapore/12hr-42min-connected-for-hours>, diakses 4 Juli 2018.

"RUU Ketahanan Keluarga Wujudkan Keluarga Indonesia Sejahtera", <http://pontianak.tribunnews.com/2017/07/18/ruu-ketahanan-keluarga-wujudkan-keluarga-indonesia-sejahtera>, diakses 4 Juli 2018.

MacPhee, D., Lunkenheimer, E., & Riggs, N. (2015). "Resilience as Regulation of Developmental and Family Processes." *Family relations*, 64(1), 153-175.



Lukman Nul Hakim
lukman.nulhakim@dpr.go.id

Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA., menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan pendidikan S2 Master of Arts in Psychology dari University of Jamia Millia Islamia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Psikologi pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal antara lain: "Pengaruh Intensitas Mengikuti Informasi Terorisme terhadap Sikap Mengenai Terorisme" (2010), "Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi Lokal melalui Internasionalisasi Pendidikan Tinggi" (2013), dan "Ulasan Konsep: Indijinuisasi Ilmu Psikologi" (2014).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.